

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PADA ASPEK
PELAYANAN PUBLIK DI DESA SADAR KECAMATAN
BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

SKRIPSI



FAJAR KARTINI

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PADA ASPEK
PELAYANAN PUBLIK DI DESA SADAR KECAMATAN
BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar untuk
memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara**

**FAJAR KARTINI
1265142006**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Persetujuan Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Makassar Nomor: 0207/UN36.6/DL/2016, tanggal 18 Januari 2016 untuk membimbing saudara:

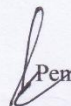
Nama : Fajar Kartini

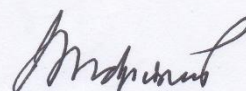
Nim : 1265142006

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.


Pembimbing I


Dr. Maharuddin Pangewa, M. Si
NIP. 19510925 197602 1 001

Makassar, 15 Agustus 2016


Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Guntur, M. Si
NIP. 19601231 198803 1 011

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 5346/UN36.6/KM/2016 tanggal 07 September 2016. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada hari Kamis 15 September 2016.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum.
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

1. Ketua : Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum. (.....)
2. Sekretaris : Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si (.....)
3. Pembimbing I : Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si (.....)
4. Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si (.....)
5. Penguji I : Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si (.....)
6. Penguji II : Ismail, S.Pd., M.Si (.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alamat. Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105
Website : <http://ian.unm.ac.id>

USUL PROPOSAL PENELITIAN/PENULISAN SKRIPSI

A. IDENTITAS

1. Nama : Fajar Kartini
2. Tempat/Tgl Lahir : Sukaraya, 21 April 1995
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265142006
4. Jurusan : Ilmu administrasi negara
5. Program Studi : Ilmu administrasi negara

B. FOKUS PENELITIAN

- ☐ Kebijakan Publik
☐ Pelayanan Publik
☒ Administrasi Pembangunan

C. JUDUL SKRIPSI YANG DIUSULKAN

1. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Pecahan di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara
2. Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Tamuku di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara
3. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

Makassar, 19 mei 2015

Diketahui Oleh:

Penasehat Akademik,

Mahasiswa yang bersangkutan

Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si
NIP. 195109251976021001

Fajar Kartini
NIM. 1265142006

P2 = Dr. Muhammad Guntur, M.Si 19/5/2015

MOTO

*Hari depan dunia lebih banyak ditentukan
moralitas keputusan kita sekarang
(Soedjatmoko)*

*Ikhlas adalah awal kemenangan
(Fajar Kartini)*

*Karya ini kupersembahkan untuk
Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga bersaku
atas segala doa dan pengorbanannya yang tulus demi
kebahagiaan dan keberhasilan Dunia Akhirat.*

ABSTRAK

Fajar Kartini. 2016. Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Maharuddin Pangewa dan Dr. H. Muhammad Guntur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Kebijakan Pemekaran Desa yang terjadi di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara telah memberikan dampak yang positif terhadap aspek pelayanan publik di sana, khususnya pada pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dilihat dari beberapa indikator yakni, Sistem/ Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana dan Kompetensi Pelaksana. Menurut hasil penelitian, pemekaran yang terjadi pada Desa Sadar sangat berdampak positif pada pelayanan publik yang ada di sana, karena membawa perubahan yang lebih baik apabila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Dengan kata lain, pemekaran Desa Sadar ini telah memenuhi harapan segenap masyarakat Desa Sadar yang menginginkan sebuah pelayanan yang berkualitas.

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan petunjuknya sehingga Skripsi ini yang berjudul ”Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara ”, dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini terdiri darilima bab yaitu, Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual, Bab III Metode Penelitian, terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Tahap-Tahap Penelitian, Sumber Data, Instrumen Penelitian, Prosedur Pengambilan Data, Pengecekan Keabsahan Data dan Analisis Data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab V terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan akan tetapi dengan usaha yang semaksimal mungkin dan dukungan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan dapat teratasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah mendampingi penulis hingga terselesainnya studi.
2. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP, Rektor Universitas Negeri Makassar
3. Prof. Dr. Hasnawi, M. Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan izin dan persetujuan mengadakan penelitian.
4. Dr. H.Muhammad Guntur,M.Si dan Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si, Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

5. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si dan Dr. H.Muhammad Guntur,M.Si, Pembimbing I dan Pembimbing II, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi serta arahan dan bimbingan sejak dari penyusunan proposal penelitian skripsi sampai penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang telah mendidik dan memberi pelayanan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
7. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan segenap aparat Desa Sadar yang telah memberikan data dan informasi
8. Kepada Muhammad Taufiq Hidayat dan seluruh rekan-rekan dikampus yang telah memberikan dukungan dan semangat sampai penyusunan skripsi ini selesai.

Akhirnya skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua, saudara-saudari serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan bantuan baik berupa moril maupun material serta doa sehingga penulis akan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya pada penulis dan serta semua pihak yang berkepentingan dengan hal ini.

Makassar, 20 Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Konsepsi Dasar Kebijakan	9
2. Konsepsi Dasar Pemekaran Desa	10
3. Konsepsi Dasar Pelayanan Publik	12
4. Berbagai Aspek Pemekaran Desa	14
5. Dampak Pemekaran Desa	20
6. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga	23
B. Kerangka Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27

C. Tahap-Tahap Penelitian	27
D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	28
E. Sumber Data	30
F. Instrumen Penelitian	30
G. Prosedur Pengambilan Data	31
H. Pengecekan Keabsahan Data	32
I. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi.....	58
C. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62
RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga yang ada di Desa Sadar	35
2.	Mata pencaharian masyarakat Desa Sadar	36
3.	Jumlah Sarana Pendidikan yang ada di Desa Sadar	37
4.	Data Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masyarakat Desa Sadar Sebelum Pemekaran	37
5.	Kepercayaan masyarakat Desa Sadar dinyatakan dalam bentuk persentase	37
6.	Jumlah Sarana Ibadah Masyarakat Desa Sadar	38
7.	Data Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masyarakat Desa Sadar Setelah Pemekaran	38

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Konseptual	25
2.	Bagan Struktur Organisasi Kantor Desa Sadar	38

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Dokumentasi Penelitian	63
2.	Matriks Penelitian	68
3.	Matriks Pedoman Wawancara.....	69
4.	Matriks Data Hasil Wawancara	70
5.	Daftar Nama Informan	79
6.	Usulan Proposal Penelitian	80
7.	Persetujuan Judul dan Calon Pembimbing.....	81
8.	Surat Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing	82
9.	Surat Izin Penelitian dari Fakultas	83
10.	Izin Penelitian BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan	84
11.	Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian	85
12.	Daftar Riwayat Hidup	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika berbicara masalah otonomi daerah maka tak akan lepas dari daerah otonom. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis, kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi. Desentralisasi, merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah selain sebagai amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif bagi pemerintah saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan objektif tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu membuat penyelenggaraan pemerintahan jauh lebih baik, efisien, efektif, mendorong dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan kehidupan yang

merata, adil serta mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Disamping itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan juga dapat membuka peluang bagi setiap daerah untuk lebih menggali dan memberdayakan potensi yang dimiliki daerah, serta memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan harapan-harapan tersebut maka dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas pemerintahan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka dipandang perlu melakukan pemekaran wilayah baik pada wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagai revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran wilayah adalah salah satu bentuk konkrit dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas

pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Pemekaran wilayah ini dimaksudkan agar proses penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat lebih merata, berkesinambungan serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu pemekaran wilayah juga dimaksudkan agar dapat mempermudah ruang kontrol pemerintah terhadap masyarakat dan mempermudah komunikasi masyarakat terhadap pemerintah.

Kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra diberbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan diantara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai opini turut disampaikan oleh masyarakat, ada yang beropini bahwa pemekaran dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh dana baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, selain itu juga muncul sebuah tuduhan bahwa pemekaran merupakan sebuah bisnis dikalangan elit di daerah yang menginginkan sebuah jabatan atau posisi dari adanya pemekaran tersebut.

Namun disisi lain banyak opini yang mendukung adanya pemekaran ini, pemekaran dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing, selain itu dengan adanya pemekaran juga dapat memperpendek rentang kendali pemerintah dalam mengontrol masyarakatnya.

Terkait hal tersebut, terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas masalah pemekaran, yaitu oleh Zakarudin pada tahun 2013 dengan judul “Dampak Pemekaran dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemekaran tidak berdampak signifikan bagi ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat terlihat dari tidak adanya fasilitas jalan yang baik, fasilitas air yang tidak sebanding dengan tingkat penggunaan masyarakat, jaringan listrik yang hingga saat ini tidak ada serta pasar tradisional yang tidak beroperasi sehingga menghambat arus pemutaran barang dan jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berdampaknya pemekaran terhadap Desa Waturempe adalah 1) Kondisi Geografis, 2) Kurangnya inisiatif Pemerintah Desa dalam pengelolaan urusannya, 3) Tendensi Politis pasca pilkada kabupaten, 4) Kurangnya pendapatan asli desa dan 5) Keterbatasan sumber daya pemerintah kabupaten.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wijoyo pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Pemekaran Desa ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga tahap proses pemekaran Desa Wanasari Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, yaitu tahap pertama, proses penjaringan aspirasi dimana masyarakat duduk bersama melakukan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan untuk memekarkan diri. Tahap kedua, pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah mendapatkan kesepakatan untuk memekarkan diri masyarakat menentukan panitia pemekaran

yang bertugas untuk membuat proposal usulan pemekaran ke bupati. Tahap ketiga yaitu proses penyusunan Raperda.

Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pemekaran desa berasal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran daerah demi mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun pada dasarnya tujuan dilakukan pemekaran adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, namun tak jarang pemekaran justru tidak berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat sendiri. Berbeda dengan kedua penelitian terdahulu, fokus dari penelitian peneliti saat ini adalah dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik yakni pada pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Seiring berjalannya waktu, banyaknya tuntutan masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan publik dan kesejahteraan hidup yang lebih baik, khususnya seperti yang dirasakan masyarakat Desa Sadar maka perlu adanya sebuah pemekaran. Desa Sadar merupakan Desa hasil pecahan dari Desa Tamuku. Sebelum dimekarkan Desa Tamuku memiliki luas wilayah 10, 2 kilometer dengan jumlah penduduk sebanyak 3. 784 jiwa, terdiri dari 810 Kepala Keluarga (KK), dan terbagi menjadi empat dusun yakni, Dusun Tamuku, Dusun Kembang Makmur, Dusun Walero dan Dusun Sadar. Setelah dimekarkan, Desa Tamuku memiliki jumlah penduduk sebanyak 2. 308 jiwa, terdiri dari 406 KK, dan terbagi menjadi empat Dusun, yakni Dusun Tamuku, Dusun Kembang Makmur, Dusun Tanatako dan Dusun Tondokura.

Hasil pemekaran dari Desa Tamuku adalah Desa Sadar. Desa Sadar diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Bupati Luwu Utara Drs. Arifin Junaidi, M. M. Desa ini berdiri dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta. Desa Sadar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.475 jiwa, terdiri dari 404 Kepala Keluarga (KK), dan terbagi menjadi empat Dusun yakni, Dusun Sadar, Dusun Walero, Dusun Tetelangka, serta Dusun Sappa.

Sebelum dimekarkan dari Desa Tamuku sebagai desa induknya, Desa Sadar dulunya adalah salah satu dusun yang berada pada cakupan Desa Tamuku. Kantor pemerintahan yang berpusat di Desa Tamuku mengakibatkan rentang kendali pemerintah terhadap masyarakat Desa Sadar saat itu cukup jauh, hal ini berdampak pada interaksi antara masyarakat Desa Sadar dengan pemerintah desa, sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Desa Sadar dalam hal pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan seperti pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga menjadi kurang maksimal.

Dengan adanya pemekaran desa ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menerima pelayanan yang terbaik dari perangkat Desa Sadar khususnya dalam hal pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Disamping itu, diharapkan juga agar pembangunan infrasturktur desa dapat lebih merata masuk di Desa Sadar karena pada hakikatnya infrasturktur yang baik akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Dampak Kebijakan Pemekaran desa pada aspek pelayan publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan pemekaran desa pada pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara berdasarkan aspek Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemekaran desa pada pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara berdasarkan aspek Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum tentang dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus kritikan terhadap perangkat pemerintah Desa Sadar terkait masalah pemekaran Desa yang berdampak pada pelayanan publik yang ada di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsepsi Dasar Kebijakan

Wilson dalam Wahab merumuskan kebijakan publik sebagai “tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).¹

Dye dalam subarsono mengemukakan kebijakan publik adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”.²

Dunn dalam syafiie mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan, dan lain-lain.³

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani suatu masalah-masalah yang terjadi demi mencapai kebaikan bersama.

¹Wilson dalam Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Malang: Bumi Aksara, hal.13

² Dye dalam Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 2

³Dunn dalam Syafiie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 106

2. Konsepsi Dasar Pemekaran Desa

a. Pengertian Desa

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengemukakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴

Eko dalam Huda Mengemukakan “desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.”⁵

Maschab dalam Huda Berpendapat bahwa apabila membicarakan masalah “desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian, yaitu:

- 1) Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, kehidupan mereka *relative homogeny*, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.
- 2) Pengertian secara ekonomis, desa merupakan suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁵ Maschab dalam Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, hal 33

- 3) Pengertian secara politik, dimana “desa” suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wawenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.⁶

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Geertz dalam Huda bahwa “desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang bergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan diluar desa.”⁷

b. Pengertian Pemekaran Daerah/ Desa

Jeddawi mengemukakan bahwa “pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah”.⁸

Lebih lanjut, Yunaldi dalam Sapi’i dkk mengemukakan bahwa pemekaran desa adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografisnya, pertumbuhan jumlah penduduk, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada.⁹

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, jelas bahwa pemekaran merupakan pemecahan daerah menjadi lebih dari satu daerah yang melalui beberapa proses pertimbangan seperti jumlah penduduk, luas daerah dan kondisi geografis.

⁶Ibid, hal. 31

⁷ ibid. hal. 33

⁸Murtir Jeddawi.2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media, hal. 22

⁹Yunaldi dalam Sapi’i.2013, *Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*. Volume 1 Nomor 1: 2-3, hal. 2

3. Konsepsi Dasar Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Sedarmayanti mengemukakan bahwa “pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang”.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah:

“kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik adalah setiap institusi/ lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik terdiri dari tiga yaitu: atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif”.¹¹

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dari pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan-pelayanan publik yang diberikan berupa pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai pelayanan administrasi kependudukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengemukakan bahwa:

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatataan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.¹²

¹⁰Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Rafika Aditama, hal. 243

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan penjelasan UU tersebut, pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk yang dimaksud adalah pencatatan biodata penduduk yang menghasilkan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga. Yang kedua adalah pencatatan sipil, merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian dan perkawinan. Dokumen yang akan dihasilkan dari pencatatan sipil ini berupa Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Menikah.

b. Standar Pelayanan Publik

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:
 - a) Persyaratan
 - b) Sistem, mekanisme dan prosedur
 - c) Jangka waktu pelayanan
 - d) Biaya/tarif
 - e) Produk pelayanan
 - f) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- 2) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (*manufacturing*) meliputi:
 - a) Dasar Hukum
 - b) Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
 - c) Kompetensi pelaksana
 - d) Pengawasan internal
 - e) Jumlah pelaksana
 - f) Jaminan pelayanan
 - g) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - h) Evaluasi kinerja pelaksana¹³

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

4. Berbagai Aspek Pemekaran Desa

a. Syarat-Syarat Pemekaran Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan bahwa pemekaran atau pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, yaitu:

1) Administratif

Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Berbeda dengan syarat administratif untuk provinsi, syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

2) Teknis

Selanjutnya, syarat yang kedua adalah syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

3) Fisik Kewilayahan

Syarat fisik kewilayahan meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan.¹⁴

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1, terdapat juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang turut mengatur syarat-syarat pemekaran wilayah secara lebih spesifik yaitu syarat pemekaran desa, syarat-syarat pemekaran desa terdiri dari:

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- 2) jumlah penduduk, yaitu:
 - a) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - b) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - f) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - i) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- 3) wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- 4) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- 5) memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- 6) batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
- 7) sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- 8) tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Menurut beberapa syarat pemekaran yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sangat jelas, bahwasannya pemekaran daerah tidak bisa begitu saja dilakukan dengan semena-mena melainkan harus melalui

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

persetujuan dari DPRD kabupaten/kota, gubernur/walikota serta rekomendasi menteri dalam negeri. Disamping itu daerah/desa yang akan dimekarkan juga harus memiliki luas daerah, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, dan potensi alam yang baik, agar kiranya setelah dimekarkan dari daerah induk, daerah hasil pemekaran mampu terus berkembang menjadi lebih baik.

b. Faktor-Faktor Pemekaran Desa

Ada Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemekaran daerah, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya.

Makagansa mengemukakan bahwan ada beberapa motif dari proses pemekaran didaerah yang tidak disebut secara terbuka oleh para penggiat pemekaran, tetapi sesungguhnya menjadi faktor esensial yang kuat mendorong terjadinya pemekaran daerah, yaitu:

- 1) Motif demi mencapai keadilan jumlah pemerintahan daerah di pulau Jawa vs luar Jawa
- 2) Motif politik identitas kultur
- 3) Motif demi menciptakan peluang perekrutan jabatan bagi elit lokal
- 4) Motif menciptakan peluang kucuran dana pusat
- 5) Motif merebut hasil kekayaan sumber daya alam
- 6) Motif dalam rangka mewujudkan pemekaran provinsi
- 7) Motif fasilitas aturan perundangan¹⁶

Tim Bank Dunia dalam Ratnawati menyatakan bahwa ada empat faktor utama yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah yaitu:

- 1) Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan.

¹⁶Makagansa. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: FusPad, hal. 165

- 2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, *urban-rural*, tingkat pendapatan, dll)
- 3) Adanya kemajuan fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang (disediakkannya dana alokasi umum, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakan sumber-sumber pendapatan asli daerah).
- 4) Motif pemburu rente para elit.¹⁷

Jeddawi mengemukakan bahwa faktor terjadinya pemekaran adalah:

- 1) Faktor pendorong seperti: faktor kesejahteraan, tidak meratanya pembangunan, rentan kendali pelayanan publik yang jauh dan tidak terakomodasinya representasi politik
- 2) Faktor penarik seperti: kucuran dana (fiskal) dari pusat
- 3) Faktor yang memfasilitasi munculnya pemekaran, diantaranya adalah: proses persiapan untuk mekar, *political crafting* oleh para elit dan faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan.¹⁸

Selain itu, Bhakti dalam Ratnawati, juga menyebutkan “ada satu motif tersembunyi dari pemekaran (*gerrymander*) yaitu usaha pembelahan atau pemekaran untuk kepentingan parpol tertentu”.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor pendorong dalam sebuah pemekaran daerah tidak sepenuhnya murni demi perbaikan kualitas hidup masyarakat, akan tetapi faktor-faktor lain seperti adanya kepentingan pribadi atau golongan-golongan elit yang ingin mendapatkan jabatan juga ikut serta dalam mendorong pemekaran suatu daerah.

¹⁷Tim Bank Dunia dalam Tri, Ratnawati. 2009. *Pemekafran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.15

¹⁸Jeddawi. op. cit. hal 116

¹⁹Bhakti dalam Ratnawati. loc. cit

c. Tujuan Pemekaran Desa

Menurut Retnaningsih, dkk dalam Jeddawi, konsepsi pemekaran dapat dilihat dari konteks tujuannya dan dari indikator kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan. Berikut adalah beberapa tujuan pemekaran yang dilihat dari beberapa aspek:

- 1) Dari aspek ekonomi: pemekaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat merespon secara cepat kebutuhan masyarakat.
- 2) Dari aspek politik: pemekaran daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, karena rentang kendali menjadi lebih pendek.
- 3) Dari aspek sosial budaya: pemekaran diharapkan dapat mengakomodasi identitas lokal dan akan berpengaruh pada pilihan-pilihan lokal dalam menentukan arah pembangunan daerah pemekaran.
- 4) Dari aspek politik keamanan: pemekaran daerah akan mendorong berkembangnya lembaga-lembaga militer dan kepolisian diluar Jawa terutama di daerah-daerah rawan konflik sosial dan konflik separatisme.²⁰

d. Prosedur Pemekaran Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Daerah pasal 14 menyebutkan ada beberapa prosedur dalam pemekaran daerah, yaitu:

²⁰Retnaningsih, dkk dalam Jeddawi.op. cit. hal. 115

- 1) Adanya aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk desa, atau Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- 2) Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat
- 3) Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi tersebut dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
- 4) Keputusan bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan:
 - a) Dokumen aspirasi masyarakat
 - b) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.
- 5) Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi
- 6) Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD Provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada presiden melalui menteri dengan melampirkan:
 - a) Hasil kajian daerah
 - b) Peta wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota
 - c) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan bupati/walikota
 - d) Keputusan DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur.²¹

e. Bentuk-Bentuk Pemekaran Desa

Ibid dalam Santoso mengemukakan bahwa bentuk-bentuk permasalahan yang dihadapi daerah pemekaran adalah sebagai berikut:

- 1) Aset daerah induk belum diserahkan ke daerah pemekaran;
- 2) Tidak ada manajemen transisi dan konsesus pengelolaan daerah pasca pemekaran yang disepakati antara daerah induk dan daerah pemekaran;
- 3) Daerah pemekaran tidak menyiapkan perangkat-perangkat administratif dan legal baru;

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Daerah pasal 14

- 4) Daerah pemekaran tidak punya potensi sumber daya daerah yang bisa dikonversi menjadi sumber-sumber ekonomi baru.²²

5. Dampak Pemekaran Desa

Jeddawi mengemukakan dampak positif dan negatif dari adanya pemekaran, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dampak Positif
 - 1) Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat.
 - 2) Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 3) Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin insentif ditata dan dikelola dengan baik.
- b. Dampak Negatif
 - 1) Proses pemekaran terkadang menimbulkan pertentangan dimasyarakat.
 - 2) Meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.²³

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jeddawi, bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat serta pemerintah. Dengan adanya pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung

²² Ibid dalam Lay Santoso. 2006. *Perjuangan Menuju Puncak*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, hal. 14

²³ Jeddawi.op. cit. hal. 113

peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Namun disisi lain, dengan adanya pemekaran akan menjadi beban tersendiri bagi APBN, karena daerah pemekaran baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset pemerintahan yang baru.

Pratikno dalam Makagansa mengemukakan dampak pemekaran daerah dari sisi positif dan negatif yang terjadi sejauh ini, yaitu:

- a. Dampak Sosio Kultural (Sosial, Politik dan Kultural)
- b. Dampak pada Pelayanan Publik
- c. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi
- d. Dampak Hankam dan Integrasi Nasional²⁴

Setiawan dalam Sapi'i menyatakan dengan adanya pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan akan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut:

- a. Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau
- b. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan gizi buruk
- c. Peningkatan kesejahteraan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- e. Pengembangan wilayah distrik.²⁵

Sedikit berbeda dengan pendapat Jeddawi, Sapi'i menyatakan bahwa “pemekaran suatu daerah akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi

²⁴Pratikno dalam Makagansa.op. cit. hal. 196-201

²⁵Setiawan dalam Sapi'i dkk, loc. cit.

masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya, pengembangan wilayah distrik, dan pemahaman pendidikan politik terhadap masyarakat pemekaran”.²⁶

Harmantyo dalam Sapi’i dkk, mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran desa di Indonesia akan menemui dampak positif maupun negatif, yaitu:

a. Dampak Positif

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut
- 2) Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah
- 3) Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau makro masyarakat, seperti bertani dan berladang

b. Dampak Negatif

- 1) Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya
- 2) Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan
- 3) Menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang dinilai secara sosial masyarakat.²⁷

Berdasarkan pendapat diatas, diambil kesimpulan bahwa dampak positif pemekaran desa dapat berpengaruh terhadap peningkatan sarana, potensi serta kemandirian yang erat dengan skala ekonomi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya pemekaran daerah akan berpengaruh terhadap kesiapan potensi alam dan sumber daya manusia.

6. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

²⁶ Sapi’i. loc. cit

²⁷ Ibid. hal. 3

a. Akta Kelahiran

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27, bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.²⁸

Berdasarkan kedua ayat tersebut jelas bahwa, Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang merigistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir.

b. Kartu Keluarga

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.²⁹

B. Kerangka Konseptual

²⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27

²⁹ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pemekaran desa sampai saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu cara pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Pada hakikatnya, pemekaran merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4.

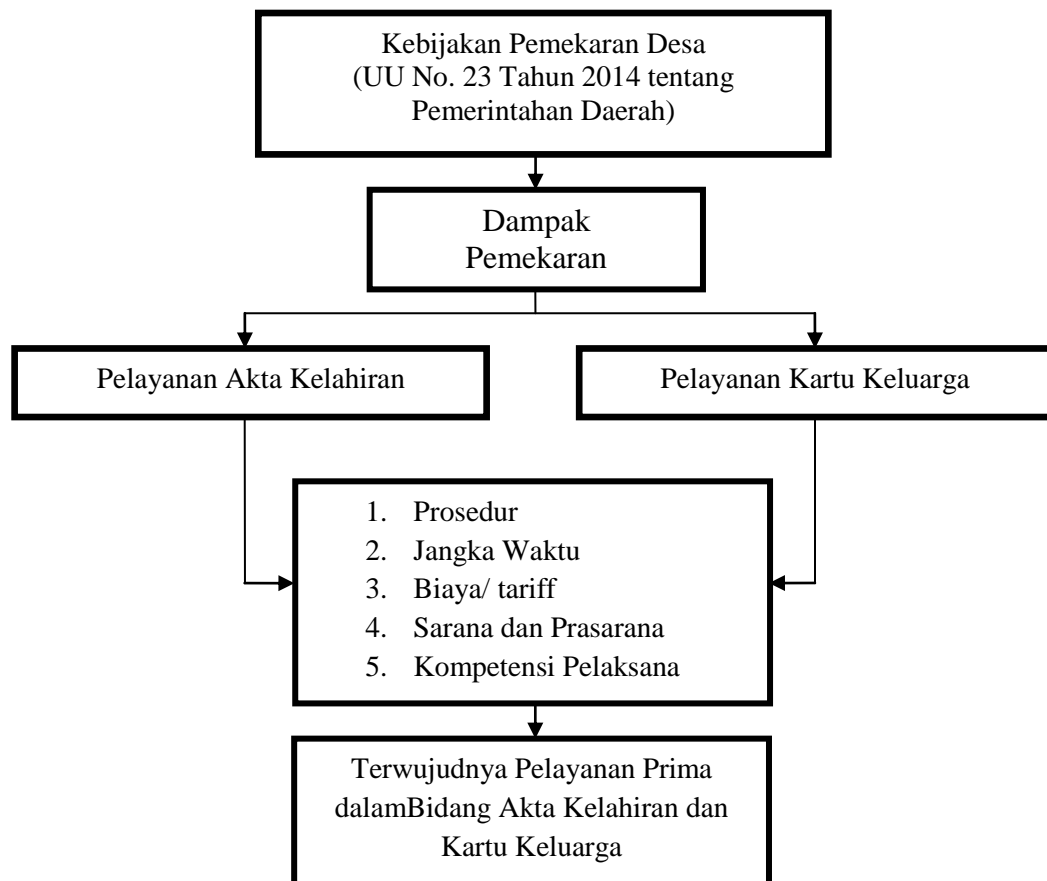
Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 1, bahwasannya Desa diberi hak untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemekaran pada tingkat desa banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini dapat dijumpai pada Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu pemekaran yang ada di Kecamatan Bone-Bone adalah pemekaran Desa Sadar. Pemekaran desa ini tentu saja membawa dampak positif dan negatif pada Desa Sadar. Kebijakan pemekaran yang terjadi di Desa Sadar akan berdampak pada aspek pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dalam penelitian ini kebijakan pemekaran desa akan dilihat dampaknya pada pelayanan administrasi kependudukan yakni pada Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Pasca dimekarkan dari Desa Tamuku, diharapkan pelayanan publik khususnya pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ada di Desa Sadar

akan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik memiliki komponen standar pelayanan yang terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: Sistem atau Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana.

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif. Alasan mengapa peneliti menggunakan metode ini karena, dalam penelitian yang peneliti lakukan saat ini melibatkan populasi dan individu sebagai sumber data yang terbatas namun masalah yang diselidiki sangat mendalam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, dokumen, catatan-catatan arsip, hasil wawancara dari masyarakat dan Lembaga pemerintahan di Desa Sadar, observasi langsung di Desa Sadar, observasi partisipan dan perangkat fisik. Dengan banyaknya data yang berasal dari berbagai sumber tersebut, maka hasil penelitian akan menjadi lebih jelas.

Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti juga bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya pemekaran desa pada aspek pelayanan publik yang berfokus pada Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak kebijakan pemekaran Desa Sadar terhadap prosedur, jangka waktu pelayanan, Biaya/ Tarif, sarana dan prasarana serta kompetensi pelaksana pada pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni Di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salah satu desa hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpiran Kecamatan Baebunta.

Alasan mengapa peneliti memilih Desa sadar sebagai lokasi penelitian karena Desa Sadar adalah salah satu desa yang telah lama menginginkan adanya pemekaran desa, dan setelah dimekarkan peneliti ingin mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari adanya pemekaran desa tersebut khususnya dampak pada pelayanan publik di Desa Sadar.

C. Tahap-Tahap Penelitian

1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian pendahuluan ini dapat dilakukan dengan studi kelapangan, kepustakaan dan dokumentasi.

2. Pengembangan Desain Penelitian

Pengembangan desain penelitian merupakan tahap penentuan informasi, teori serta instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan pengembangan desain penelitian ini adalah untuk mengembangkan desain penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris untuk

menjawab pertanyaan penelitian. Dalam tahap ini juga akan diidentifikasi dan dipilih masalah penelitian serta kerangka konseptual yang akan digunakan.

3. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan tahap dimana pengumpulan data dan analisis data akan dilakukan. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi tentang dampak pemekaran desa yang dilihat pada aspek pelayanan publik di Desa Sadar. Sedangkan analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul dan kemudian dianalisis, diuji kebenarannya dan pada akhirnya diambil kesimpulan.

4. Penulisan Laporan

Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari sebuah kegiatan penelitian. Pada tahap ini, data yang telah disimpulkan akan dipublikasikan bagi instansi yang terkait untuk dijadikan bahan evaluasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, diharapkan saran yang terdapat pada bagian penutup skripsi ini dapat menjadi masukan yang positif dalam proses pelayanan publik yang ada di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pada Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dengan memperhatikan lima indikator-indikator berikut, yaitu: sistem atau prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, sarana dan prasarana/ fasilitas dan kompetensi pelaksana.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus pada penelitian ini akan membahas mengenai dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik yang berfokus pada Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan meliputi indikator-indikator seperti Sistem/ Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana dengan deskripsi sebagai berikut:

- a. Sistem atau Prosedur, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejelasan prosedur yang diberikan oleh perangkat Desa Sadar kepada masyarakat yang akan mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
- b. Jangka Waktu Pelayanan, adalah waktu yang diperlukan untuk mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mulai dari tahap awal sampai tahap akhir pengurusan.
- c. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada masyarakat Desa Sadar dalam mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Desa Sadar.
- d. Sarana dan prasarana, adalah fasilitas yang diberikan Kantor Desa Sadar dalam mendukung pelayanan terhadap masyarakat, seperti tersedianya ruang tunggu, peralatan/perlengkapan, dan toilet umum.
- e. Kompetensi pelaksana, adalah kecakapan dan keramahan perangkat Desa Sadar dalam memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada masyarakat.

E. Sumber Data

1. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian secara langsung tanpa perantara. Data primer dapat berupa pendapat dari individu atau kelompok mengenai dampak kebijakan pemekaran Desa Sadar pada Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa Sadar
- b. Kaur Administrasi Desa Sadar
- c. Masyarakat Desa Sadar

2. Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan buku yang ada pada kantor Desa Sadar atau data pelengkap yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang membahas masalah dampak kebijakan pemekaran.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau mengumpulkan informasi kuantitatif maupun kualitatif sebagai bahan pengelolaan yang berkenaan dengan objek ukur yang sedang diteliti. Instrumen penelitian adalah alat untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis ada dua, 1) Atribut Kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan; dan 2) Atribut Non-Kognitif, perangsangnya adalah pernyataan.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi sejauh mana peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan, dimana yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

G. Prosedur Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data selama penelitian di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur (*unstructured interview*). Metode ini menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap, peneliti akan bertatap muka dengan informan dan menanyakan garis-garis besar permasalahan mengenai dampak kebijakan pemekaran Desa terhadap aspek pelayanan publik pada sektor pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga di Desa Sadar. Sebelum wawancara, peneliti akan mengadakan janji dengan calon informan, untuk menentukan tempat, dan waktu wawancara.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Pada teknik observasi ini, penulis menggunakan teknik observasi nonpartisipan, dimana dalam teknik ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen di kantor Desa Sadar.

3. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti akan melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Kemudian peneliti akan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, baik dokumen tertulis maupun gambar untuk menjadi suatu hasil yang sistematis dan utuh.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengabsahan data dalam melakukan penelitian merupakan cara untuk mencapai kredibilitas peneliti dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya dari informan yang ada di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Informasi-informasi yang dianggap sama dan relevan dari para informan akan dipilih dan kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Member Check

Member check dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data, berdasarkan catatan

peneliti tentang apa yang telah dikatakan informan. Cara ini dilakukan agar informan dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan apa yang masih kurang. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh informan maka data tersebut *valid*.

I. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, pengamatan, dokumen resmi, dan gambar atau foto yang telah diperoleh di lapangan selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Cara analisis data dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bersifat merangkum, menggolongkan dan mengarahkan data hasil penelitian di Desa Sadar. Reduksi data juga membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu dalam penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian di lapangan setelah direduksi akan memberikan informasi atau gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data akan membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan apa yang harus peneliti lakukan selanjutnya. Bentuk penyajian data

dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif, grafik, matriks dan bagan.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Pada tahap ini kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru berbeda dari temuan yang sudah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Sadar

Desa Sadar merupakan salah satu desa hasil pemekaran yang ada di Kecamatan Bone-Bone yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Bupati Luwu Utara Drs. Arifin Junaidi, M.M dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2012.

Luas wilayah Desa Sadar sekitar 10.74 km², terbagi menjadi empat dusun yaitu: Dusun Sadar, Dusun Welaro, Dusun Tetelangka dan Dusun Sappa. Adapun batas-batas Desa Sadar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tamuku

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Tamuku

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Sungai Kanjiro

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Batangtongka

2. Keadaan Demografis Desa Sadar

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2015, Desa Sadar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.475 jiwa terbagi menjadi 404 Kepala Keluarga dengan jumlah laki-laki sebanyak 734

jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 742 jiwa. Adapun jumlah penduduk dari empat dusun yang ada di Desa Sadar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga yang ada di Desa Sadar

Dusun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah KK
Dusun Sadar	254	250	145
Dusun Welaro	138	137	72
Dusun Tetelangka	171	165	94
Dusun Sappa	168	190	93
Jumlah	734	742	404

Sumber Data: Profil Desa³⁰

b. Mata Pencaharian

Tabel 2 Mata Pencaharian masyarakat Desa Sadar

Mata Pencaharian	Jumlah (KK)
Petani/Pekebun	220
Buruh	112
Tukang Bangunan	6
Pedagang	22
Petani Tambak	42
PNS	12
Jumlah	404

Sumber Data: Profil Desa Sadar³¹

³⁰ Profil Desa Sadar

c. Sarana Pendidikan

Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan yang ada di Desa Sadar

Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)
SD/Sederajat	1 Unit
SMP/Sederajat	-
SMA/Sederajat	-

Sumber Data: Profil Desa Sadar³²

d. Data Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masyarakat Desa Sadar Sebelum Pemekaran.

Tabel 4 Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebelum pemekaran

Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Belum Memiliki		Telah Memiliki	
		KK	Akta Kelahiran	KK	AktaKelahiran
1.476	404	181 KK	885 Jiwa	222 KK	590 Jiwa

Sumber Data: Profil Desa Sadar³³

e. Kepercayaan dan Sarana Ibadah

Tabel 5 Kepercayaan masyarakat Desa Sadar dinyatakan dalam bentuk persentase

Agama	Frekuensi (%)
Islam	60%
Kristen	40%

³¹ ibid

³² ibid

³³ ibid

Tabel 6 Jumlah Sarana Ibadah Masyarakat Desa Sadar

Sarana Ibadah	Jumlah (Unit)
Masjid	2
Gereja	3

Sumber Data: Profil Desa Sadar³⁴

f. Data Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masyarakat Desa Sadar Setelah Pemekaran.

Tabel 7 Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah pemekaran

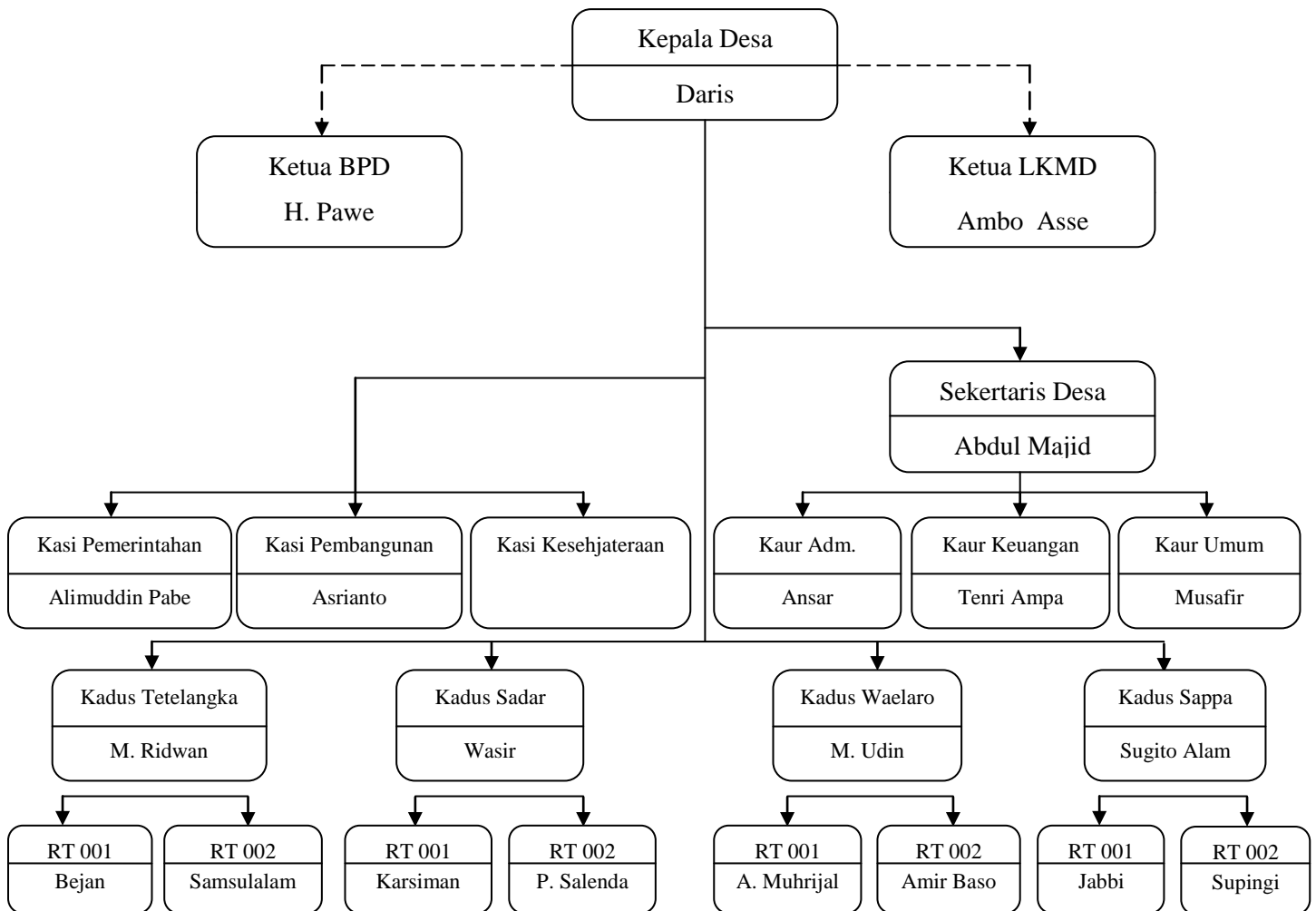
Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Belum Memiliki		Telah Memiliki	
		KK	Akta Kelahiran	KK	AktaKelahiran
1.476	404	-	442 Jiwa	404 KK	1033 Jiwa

Sumber Data: Profil Desa Sadar³⁵

³⁴ ibid

³⁵ ibid

g. Bagan Struktur Organisasi



Sumber Data: Profil Desa Sadar³⁶

B. Hasil Penelitian

Data yang disajikan pada hasil penelitian ini bersumber dari wawancara yang berupa tanya jawab dengan cara bertatap muka bersama informan yang ada di Desa Sadar. Selain data hasil wawancara, dokumen lain yang turut mendukung dan menunjang dalam penelitian ini juga menjadi salah satu data yang akan disajikan dalam hasil penelitian. Data yang disajikan oleh peneliti akan berhubungan dengan fokus utama penelitian ini, yaitu dampak kebijakan

³⁶ Ibid

pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

Pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa cara dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur pembangunan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada aparat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan. Selain beberapa hal tersebut, pemberian pelayanan publik yang prima oleh pemerintah desa kepada masyarakat juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kemandirian sebuah desa, khususnya pasca pemekaran. Senada dengan hal tersebut, fokus penelitian peneliti saat ini adalah pada pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Desa Sadar.

Berbicara masalah administrasi kependudukan, tak akan lepas dari sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada penelitian ini, pelayanan administrasi kependudukan yang akan diteliti oleh peneliti adalah pencatatan sipil, yaitu akta kelahiran dan kartu keluarga.

Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan enam informan, yakni Sekretaris Desa Sadar, Kaur Administrasi Desa Sadar serta empat

masyarakat Desa Sadar yang masing-masing bernama Ibu Sumiati, Ibu Yustina, Ibu Susiyam dan Ibu Ranti.

Pada penelitian ini yang menjadi acuan dalam mengukur seberapa besar dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Sadar adalah berdasarkan pada indikator-indikator yang terdapat pada Komponen Standar Pelayanan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Sistem/Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana. Selain itu terdapat pula informasi mengenai sejarah asal mula nama Desa Sadar.

1. Sejarah Nama Desa Sadar

Desa Sadar adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Tamuku. Desa Sadar merupakan salah satu dusun yang ada di wilayah Desa Tamuku. Adapun sejarah dari nama Desa Sadar menurut hasil wawancara bersama Bapak Abdul Majid (wawancara, 26 Januari 2016), selaku Sekretaris Desa Sadar, sebagai berikut:

“Dulu awalnya desa ini adalah Desa Tamuku, setelah dimekarkan nama pertama yang diberikan pada desa ini adalah *Resatlemen* Tamuku 1 yang artinya pemukiman masyarakat disekitar itu dalam satu kecamatan atau kabupaten. Dahulu tempat ini masih hutan dan desa induk memang Desa Tamuku, setelah adanya transmigrasi maka Desa Tamuku terbagi menjadi dua daerah yaitu daerah *Resatlemen* Tamuku 1 dan Batang Tongka Tamuku 2. Namun dikemudian hari, sekitar tahun 1979 tokoh-tokoh masyarakat disini mengadakan musyawarah untuk mengubah nama *Resatlemen* Tamuku 1, dan pada akhirnya nama *Resatlemen* Tamuku 1 diubah menjadi Sadar yang artinya agar masyarakat Desa Sadar tetap sadar untuk tinggal di daerah itu. Nama pencetus Desa Sadar adalah Ustadz Zakir”.³⁷

³⁷ Wawancara bersama Bapak Abdul Majid Tanggal 26 Januari 2016

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Abdul Majid selaku Sekretaris Desa Sadar saat ini, Desa Tamuku adalah salah satu Desa tua yang ada di Kecamatan Bone-Bone saat itu. Setelah adanya transmigrasi, Desa Tamuku terbagi menjadi beberapa daerah yaitu Restlemen Tamuku 1 dan Batang Tongka Tamuku 2. Namun pada sekitar tahun 1979 melalui hasil musyawarah para tokoh-tokoh masyarakat saat itu, nama daerah Restlemen Tamuku 1 diganti menjadi Sadar yang memiliki harapan bahwa warga di daerah tersebut sadar untuk tetap tinggal di Desa Tamuku sebagai Desa Induk saat itu.

2. Analisis Dampak Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik.

1. Sistem atau Prosedur

Prosedur merupakan sistem kerja aparat pemerintah Desa Sadar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sebuah pelayanan, kesederhanaan prosedur merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Kesederhanaan prosedur yang diberikan aparat pemerintah Desa Sadar kepada masyarakat dapat terlihat dari cara aparat memberi pelayanan kepada masyarakat yang tidak mengenal tempat. Masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga tidak harus datang ke kantor desa, karena aparat pemerintah Desa Sadar juga menerima dengan baik masyarakat yang datang kerumah Kepala Desa dan Sekretaris Desa meskipun telah diluar jam kerja. Selain itu, aparat pemerintah Desa Sadar juga selalu siap untuk membantu masyarakat membawa kelengkapan syarat-syarat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga ke kantor kependudukan, oleh

karena itu masyarakat tak perlu lagi bersusah payah menuju ke kantor kependudukan. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Abdul Majid (wawancara 26 Januari 2016) selaku sekretaris Desa Sadar dalam sela-sela wawancara berikut:

“saya tidak keberatan jika harus melayani masyarakat diluar jam kerja saya. Saya juga menerima masyarakat yang datang kerumah saya untuk mendapatkan pelayanan, sekalipun pada malam hari. Tapi untuk hari sabtu dan minggu saya mohon maaf, saya tidak bisa melayani masyarakat karena pada hari itu saya berada di kebun”.³⁸

Pendapat yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak Ansar (wawancara 26 Januari 2016) selaku Kaur Administratif Desa Sadar yang siap untuk membantu masyarakat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga ke kantor kependudukan, dalam petikan wawancara berikut:

“Jika masyarakat ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, datang saja ke kantor desa dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Jika masyarakat tidak sempat untuk datang ke kantor kependudukan maka kami yang akan membantu masyarakat untuk ke kantor kependudukan”.³⁹

Dengan adanya kesederhanaan seperti itu, masyarakat akan merasa sangat dimudahkan dalam melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Jika pada siang hari masyarakat sibuk, maka pada malam harinya mereka masih dapat mendapatkan pelayanan dari aparat pemerintah Desa Sadar. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Ibu Rianti (wawancara 26 Januari 2016):

“awalnya Saya datang ke rumah kepala desa, kemudian saya diberi tahu tentang syarat-syarat yang harus saya bawa. Setelah itu ada salah satu aparat yang datang kerumah saya untuk mengambil syarat-syarat yang telah saya lengkapi dan kemudian saya hanya tinggal menunggu akta kelahiran dan kartu keluarga saya jadi”.⁴⁰

³⁸Ibid.

³⁹ Wawancara dengan Ansar selaku Kaur Administrasi Tanggal 26 Januari 2016

⁴⁰ Wawancara dengan Rianti selaku masyarakat Desa Sadar Tanggal 26 Januari 2016

Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Sumiati dalam petikan wawancara berikut:

“ waktu itu saya datang ke kantor desa, saya bilang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya diberi tahu syarat-syaratnya dan saya mengisi blanko yang dikasih ke saya, setelah itu aparat Desa Sadar yang menguruskan saya ke Kantor Kependudukan”.⁴¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yustina (wawancara 26 Januari 2016) dalam petikan wawancara berikut:

“ waktu itu saya datang ke kantor desa, saya dikasih tahu tentang syarat-syarat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya pulang kerumah, saya siapkan syarat-syaratnya dan besoknya ada aparat pemerintah desa yang datang untuk mengambil syarat-syarat yang sudah saya lengkapi”.⁴²

Hal ini juga dibuktikan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di Desa Sadar, mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sadar adalah sebagai petani atau pekebun, secara tidak langsung pada siang hari masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di kebun atau di sawah dan jika mereka kembali pada sore hari, maka jam pelayanan di kantor desa telah usai. Namun dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa Sadar saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Jika dibandingkan pada saat sebelum pemekaran, masyarakat kini benar-benar merasakan kesederhanaan prosedur, pasalnya sebelum pemekaran masyarakat harus meluangkan cukup banyak waktu untuk dapat ke kantor desa yang jaraknya tak sedekat saat ini untuk bisa mendapatkan pelayanan aparat pemerintah.

⁴¹ Wawancara dengan Sumiati Selaku Masyarakat Desa Sadar Tanggal 26 Januari 2016

⁴² Wawancara dengan Yustina Tanggal 26 Januari 2016

2. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan ialah tenggang waktu yang di butuhkan oleh aparat desa untuk menyelesaikan proses pelayanan masyarakat seperti pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal pelayanan publik, aparat pemerintah desa hendaknya memberikan kepastian jangka waktu proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pasca pemekaran desa diharapkan aparat pemerintah desa mampu menyelesaikan pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dan lebih baik. Beda halnya pada Desa Sadar yang belum mampu memberikan kepastian terhadap jangka waktu pelayanan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kepastian waktu yang diberikan oleh Dinas Kependudukan kepada aparat pemerintah Desa Sadar dalam proses penyelesaian akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun disisi lain, aparat pemerintah Desa Sadar telah mampu menyelesaikan proses pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak Abdul Majid selaku sekretaris Desa Sadar (wawancara 26 Januari 2016) dalam petikan wawancara berikut:

“ untuk pegurusan akta kelahiran dan kartu keluarga biasa memakan waktu satu minggu lebih, karena pada dasarnya tempat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga itu berbeda jadi harus diselesaikan satu persatu. Kemudian lama atau tidaknya proses pengurusan itu tergantung ada atau tidaknya Ibu Kepala Dinas, karena yang bertanda tangan pada akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Kepala Dinas”.⁴³

Pendapat dari Bapak Abdul Majid juga diperkuat dari pengakuan Ibu Susiyam yang sempat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga. (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu

⁴³Wawancara dengan Abdul Majid. Loc.cit

keluarga, kurang lebih 2 minggu baru jadi. Lumayan cepat bila dibandingkan sebelum pemekaran dulu”.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Sumiati (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga disini, kurang lebih 1 atau 2 minggu baru selesai semua. Tapi itu lebih cepat dari pada saat sebelum pemekaran dulu yang hampir 1 bulan baru jadi”.

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rianti (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “Sebelum pemekaran dulu saya pernah mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, tapi saya lupa berapa lama baru jadi. Kemarin waktu saya urus di Kepala Desa, lima hari sudah jadi akta kelahiran dan kartu keluarga saya”.⁴⁴

Hasil wawancara di Desa Sadar menjelaskan bahwa, aparat pemerintah desa belum mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat masalah jangka waktu proses pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun disisi lain, aparat pemerintah Desa Sadar telah mampu mengubah jangka waktu pelayanan menjadi lebih cepat bila dibandingkan saat sebelum pemekaran. Hal itu merupakan sebuah dampak positif dari adanya sebuah pemekaran desa.

3. Biaya atau Tarif

Biaya atau tarif ialah ongkos yang harus di bayar masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 31 Ayat (1) menjelaskan bahwa biaya/ tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. Di

⁴⁴ Wawancara dengan Rianti, loc. cit

Desa Sadar, dalam hal pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, aparat pemerintah Desa Sadar tidak memungut biaya kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Majid dalam petikan wawancara berikut:

“ Di sini, untuk saya pribadi tidak memberikan tarif kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, karena hal tersebut berkaitan dengan pungli. Disamping itu, jika ingin melakukan pungutan harus ada perdanya, dan perda itu masuk dalam APBD desa”.⁴⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ansar selaku Kaur Administrasi Desa Sadar dalam petikan wawancara berikut (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “kalo untuk masalah biaya, aparat pemerintah Desa Sadar tidak menentukan biaya atau tarif kepada masyarakat yang akan mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga”.⁴⁶

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Yustina dalam petikan wawancara berikut (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu, saya mengeluarkan biaya sebanyak Rp.50.000 ”.⁴⁷

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yustina, Ibu Susiyam juga mengungkapkan masalah biaya pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, (wawancara tanggal 27 Januari 2016), “Karena saya tidak bisa mengurus ke Kabupaten jadi saya minta tolong sama orang-orang di kantor desa untuk kesana, waktu itu saya bayar Rp. 50.000 untuk pengganti bensin”.⁴⁸

Selain kedua pernyataan tersebut, terdapat pula pernyataan dari Ibu Rianti (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “saya membayar Rp. 100.000 saat saya

⁴⁵ Wawancara dengan Abdul Majid, loc. cit

⁴⁶ Wawancara dengan Ansar, loc. cit

⁴⁷ Wawancara dengan Yustina Selau masyarakat Desa Sadar tanggal 26 Januari 2016

⁴⁸ Wawancara dengan Susiyam Selaku masyarakat Desa Sadar Tanggal 26 Januari 2016

mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu kepada aparat yang menguruskan saya di Kependudukan, itu untuk transportasi ke Kabupaten”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di Desa Sadar, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya aparat pemerintah Desa Sadar tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, akan tetapi menurut pengamatan peneliti pada saat berada dilapangan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sadar selalu mengandalkan aparat pemerintah untuk membawa berakas-berkas yang pengurusan Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga yang telah lengkap ke Kabupaten. Dan karena hal itu pula, telah menjadi tradisi masyarakat memberikan ongkos pengganti kepada aparat yang membantu mereka membawa berkas ke Kabupaten hingga selesai.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Sadar masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum. Meskipun demikian, masyarakat Desa Sadar tetap merasa nyaman dan memaklumi kondisi kantor desa tersebut akibat pasca pemekaran. Disamping itu, pada dasarnya masyarakat Desa Sadar sangat jarang untuk berkunjung ke kantor desa sekalipun ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah Desa Sadar.

⁴⁹ Wawancara dengan Rianti, loc. cit

Kurangnya sarana dan prasarana di kantor Desa Sadar diungkapkan oleh Bapak Abdul Majid selaku Sekretaris Desa Sadar (wawancara, 26 Januari 2016) dalam petikan wawancara berikut:

“sarana dan prasarana desa pasca pemekaran, jika dilihat dalam hal kesehatan desa kami telah memiliki Pustu (pusat kesehatan terpadu) yang dulunya saat belum dimekarkan kami belum memiliki itu. Untuk sarana dan prasarana di kantor desa, kami telah memiliki perangkat komputer untuk melayani keperluan masyarakat, namun untuk fasilitas yang ada didalam kantor desa sendiri belum terlalu banyak terlihat hanya ada kursi dan meja, karena kantor desa kami masih dalam proses pembenahan pasca pemekaran. Namun hal tersebut tidak mengganggu proses pelayanan aparat pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat”.⁵⁰

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Majid, Ibu Yustina juga memaparkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Sadar dalam petikan wawancara berikut, (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “saya pernah ke Kantor Desa Sadar, kalau kantor desa sadar itu fasilitas yang saya lihat hanya ada kursi, meja dan gambar-gambar. Mungkin karena sedang diperbaiki jadi masih terbatas fasilitasnya”.⁵¹

Sependapat dengan pendapat Ibu Yustina, Ibu Sumiati juga mengungkapkan sarana dan prasarana kantor Desa Sadar dalam petikan wawancara berikut (wawancara tanggal 27 Januari 2016), “ kalau saya lihat, sementara inikan kantor desa disini sedang dalam proses pembangunan, jadi yang ada hanya meja dan kursi dan itu bisa dimaklumi.”⁵²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rianti dalam petikan wawancara berikut (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “saya pernah ke kantor

⁵⁰ Wawancara dengan Abdul Majid, loc. cit

⁵¹ Wawancara dengan Yustina, loc. cit

⁵² Wawancara Sumiati, loc.cit

Desa Sadar saat saya mengambil sembako, dan saya melihat ada kursi dan meja kayu. Lumayan nyamanlah tempatnya, karena masih diperbaiki juga”.⁵³

Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana di Kantor Desa Sadar telah diakui oleh beberapa masyarakat yang pernah datang ke kantor desa. Fasilitas yang seharusnya dapat mendukung tercapainya proses pelayanan publik yang baik, justru kurang memadai. Semua itu dikarenakan saat ini Desa Sadar masih dalam masa pembangunan pasca pemekaran dan hal tersebut dapat dimaklumi oleh masyarakat Desa Sadar. Akan tetapi, pada sisi kesehatan dampak positif yang nampak adalah munculnya fasilitas kesehatan Pusat Kesehatan Terpadu (Pustu) yang dulunya saat sebelum dimekarkan belum ada di Desa Sadar.

5. Kompetensi Pelaksana

Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan publik di kantor Desa Sadar menjadi pelayanan prima, kompetensi pelaksana yakni kecakapan dan keramahan aparat pemerintah kantor Desa Sadar yang baik menjadi salah satu indikator yang turut mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Kecakapan dan keramahan aparat pemerintah kantor Desa Sadar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari kehandalan, kemampuan dan tingkah laku aparat dalam merespon setiap pelayanan yang akan ataupun tengah dilakukan oleh masyarakat. Sejak dimekarkan dari desa induk, Desa Sadar selalu berusaha memperbaiki kualitas aparat pemerintah kantor Desa Sadar dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun dengan penuh keterbatasan. Hal ini dibuktikan dengan kecakapan aparat pemerintah desa

⁵³ Wawancara dengan Rianti, loc. cit

yang menggunakan sistem jemput bola pada masyarakat yang ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah. Pasca dimekarkan dari Desa Tamuku, secara tidak langsung Desa Sadar memiliki sumber daya manusia baru yang sejatinya belum memiliki pengalaman dalam melayani masyarakat. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Abdul Majid selaku Sekretaris Desa Sadar dalam petikan wawancara berikut (wawancara tanggal 26 Januari 2016):

“Terus terang saja, disini sumber daya manusiannya masih kurang. Saya juga kurang tahu bagaimana program program dari atas, seharusnya itu aparat desa baru di tata, karena pada dasarnya mereka belum pernah mengadakan pelatihan sebelumnya. Seharusnya mereka dilatih agar mereka juga mempunyai ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi, apapun yang saya tahu selama ini saya beri tahukan kepada mereka agar mereka bisa sambil belajar. Dan setau saya yang dilatih diatas selama ini adalah ketua BPD, Kepala Desa dan Sekertaris Desa. Namun untuk masalah keramahan, aparat pemerintah Desa Sadar sangat ramah kepada masyarakat.”⁵⁴

Meskipun menurut pengakuan Bapak Abdul Majid selaku Sekertaris Desa Sadar, kecakapan aparat Kantor Desa Sadar masih kurang karena belum adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para aparat pemerintah, namun tak bisa dipungkiri keramahan dan kesopanan aparat dalam melayani masyarakat telah dirasakan dengan baik oleh masyarakat selama ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susiyam (wawancara tanggal 26 Januari 2016) dalam petikan wawancara berikut: “sikap aparat selama ini kepada saya sangat baik, ramah dan mereka selalu cepat dalam melayani saya”.⁵⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sumiati (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “sikapnya aparat baik, pada saat saya datang kesana saya langsung

⁵⁴ Wawancara dengan Abdul Majid, loc. cit

⁵⁵ Wawancara dengan Susiyam, loc. cit

ditanya-tanya keperluan saya, tidak ada yang sombong dan cepat semua dalam bekerja”.⁵⁶

Tak jauh berbeda, Ibu Rianti juga mengungkapkan hal yang sama (wawancara tanggal 26 Januari 2016, “pak sekdes selama ini sangat baik pada saya, ramah sekali”.⁵⁷

Terlihat dari hasil pengamatan, bahwasannya kompetensi pelaksana merupakan salah satu hal yang penting dalam pelayanan masyarakat. Di Desa Sadar sendiri khususnya, meskipun pengetahuan dan ilmu aparat pemerintah Desa Sadar masih kurang karena merupakan sumber daya manusia baru pasca dimekarkan dan tidak adanya pelatihan dari pusat kepada aparat pemerintah Desa Sadar, namun hal tersebut tidak membatasi aparat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terbukti, selama ini masyarakat merasa bahwa aparat telah bekerja dengan cakap, baik dan ramah kepada masyarakat saat berkomunikasi. Sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik pasca pemekaran.

C. Pembahasan

1. Prosedur

Prosedur merupakan cara yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Dalam pelayanan publik yang baik, kesederhanaan prosedur sangat dibutuhkan karena akan menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat. Cara pengurusan yang cepat, benar dan tidak

⁵⁶ Wawancara dengan Sumiati, loc. cit

⁵⁷ Wawancara dengan Rianti, loc. cit

berbelit-belit merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik.

Di Desa Sadar sendiri, prosedur yang diterapkan oleh aparat pemerintah menjadi salah satu contoh dari apa yang disebut kesederhanaan prosedur. Kesederhanaan prosedur yang diberikan aparat pemerintah Desa Sadar kepada masyarakat berupa mudahnya sistem komunikasi antara aparat terhadap masyarakat yang dapat dilakukan dimanapun tanpa harus secara formal datang ke kantor desa meskipun diluar jam kerja aparat pemerintah.

Hal ini merupakan sebuah kebijakan yang diberikan aparat pemerintah Desa Sadar kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik seperti mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dan tentunya kebijakan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat karena pada akhirnya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit. Selain itu, kesederhanaan ini merupakan satu dari beberapa dampak positif yang timbul akibat pemekaran desa terhadap proses pelayanan publik.

2. Jangka Waktu

Jangka waktu pelayanan merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima pelayanan. Setiap instansi pelayanan hendaknya memiliki kepastian waktu yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

Di Desa Sadar, aparat pemerintah belum mampu memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dikarenakan dalam proses pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga banyak pihak yang terlibat. Bukan hanya aparat

pemerintah desa, akan tetapi juga melibatkan pihak yang ada di kecamatan, dan kabupaten untuk menyelesaikan satu akta kelahiran dan kartu keluarga.

Meskipun demikian, menurut peneliti hendaknya aparat pemerintah Desa Sadar telah mampu memberikan waktu yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan saat sebelum pemekarn.

3. Biaya atau Tarif

Biaya atau tarif merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan.

Di Desa Sadar, pada dasarnya aparat pemerintah tidak menentukan atau mengenakan biaya kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik. Namun tak jarang masyarakat juga mengeluarkan ongkos pada saat melakukan pengurusan pelayanan. Seperti halnya pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga akan dikenakan biaya sejumlah Rp. 50. 000 sampai dengan Rp. 100.000. Biaya ini dipergunakan untuk biaya transportasi bagi aparat pemerintah Desa Sadar yang membantu masyarakat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga di Kantor Camat dan di Kantor Kependudukan di Kabupaten.

Menurut pengakuan beberapa informan, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat saat ini lebih baik apabila dibandingkan pada saat Desa Sadar belum dimekarkan dari desa induk.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat penunjang dalam pencapaian suatu tujuan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu proses pelayanan publik menjadi lebih baik. Fungsi utama sarana dan prasarana adalah untuk mempercepat proses pelayanan, memberikan hasil kerja yang lebih berkualitas, memberikan kenyamanan dan menimbulkan rasa puas kepada orang-orang yang memerlukan pelayanan.

Pada Kantor Desa Sadar sendiri, ketersediaan sarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya terpenuhi. Hanya terlihat meja, kursi dan fasilitas MCK yang telah tersedia di Kantor Desa Sadar. Hal ini disebabkan karena Kantor Desa Sadar saat ini sedang dalam proses pembangunan pasca pemekaran. Namun hal ini tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepuasan pelayanan dari aparat pemerintah Desa Sadar dan kenyamanan saat berada di Kantor Desa Sadar.

5. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana merupakan kemampuan yang dimiliki oleh aparat pemerintah Desa Sadar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Kompetensi aparat dalam hal ini meliputi kecakapan, daya tanggap dan keramahan aparat pemerintah Desa Sadar selama proses pelayanan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari sumber daya manusia, aparat pemerintah Desa Sadar merupakan Sumber Daya Manusia yang baru terbentuk dan belum pernah melakukan pelatihan selama pasca pemekaran desa. Namun kinerja aparat pemerintah Desa Sadar yang baik sangat dirasakan oleh masyarakat, hal ini

menjadi salah satu bukti bahwa aparat pemerintah Desa Sadar selaku sumber daya manusia baru memiliki kecakapan dan daya tanggap yang handal meskipun tanpa adanya pelatihan dari pemerintah pusat. Selain kecakapan dan daya tanggap yang baik, aparat pemerintah Desa Sadar juga memiliki keramahan yang patut untuk dicontoh oleh aparat-aparat pemerintah lainnya.

Kompetensi aparat seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membangun desa, khususnya desa hasil pemekaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dampak kebijakan pemekaran desa pada pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara berdasarkan aspek Prosedur, Jangka Waktu pelayanan, Biaya/ Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Prosedur: dampak kebijakan pemekaran yang terjadi di Desa Sadar membawa dampak yang positif terhadap prosedur pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Menurut hasil penelitian, pasca pemekaran masyarakat banyak mendapat kemudahan dalam mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Pasaunya, masyarakat yang ingin mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tak harus selalu datang ke Kantor Desa untuk bisa mendapatkan pelayanan aparat, masyarakat dapat mendatangi rumah aparat desa meskipun telah berada diluar jam kerja kantor.
2. Jangka Waktu: pada aspek penelitian ini, kebijakan pemekaran desa kembali memberikan dampak yang positif terhadap waktu pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Meskipun aparat Desa Sadar belum mampu memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dikarenakan beberapa hal, namun aparat pemerintah desa sadar telah mampu menyelesaikan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga lebih cepat bila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran dan ini merupakan dampak positif pemekaran desa.

3. Biaya/ Tarif: dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pemekaran desa terhadap jumlah biaya/ tarif yang dikeluarkan masyarakat pada saat mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sangat terlihat jelas. Setelah dimekarkan, masyarakat tak lagi mengeluarkan banyak uang untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga. Masyarakat hanya mengganti uang transport yang digunakan oleh aparat desa yang membantu masyarakat tidak ingin bersusah payah mengurus ke kantor pencatatan sipil di Kabupaten.
4. Sarana dan Prasarana: di Kantor Desa Sadar sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat kurang. Hanya terlihat Kursi Plastik dan meja kayu serta fasilitas MCK yang ada di Kantor Desa Sadar. Pada aspek ini, dampak kebijakan pemekaran desa belum memberikan dampak yang positif dikarenakan kantor desa sadar masih dalam proses pembangunan saat ini.
5. Kompetensi Pelaksana: kebijakan pemekaran desa mengharuskan Kantor Desa Sadar menciptakan sumber daya manusia baru demi untuk melayani masyarakat dengan baik. Secara pengalaman sumber daya manusia baru yang ada di Kantor Desa Sadar masih sangat kurang akan tetapi kecakapan dan keramahan yang diberikan aparat desa ketika melayani masyarakat telah mampu memberikan rasa puas tersendiri terhadap masyarakat.

B. Implikasi

Hasil penelitian tentang dampak kebijakan pemekaran desa ini merupakan bukti ilmiah akan pentingnya kebijakan pemekaran bagi sebuah desa, agar kedepannya nanti kesejahteraan hidup masyarakat dapat lebih baik melalui pembangunan desa yang merata, perekonomian masyarakat desa yang meningkat

serta pelayanan publik yang prima khususnya pelayanan publik di Desa Sadar pada aspek Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

C. Saran

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memberikan rekomendasi saran-saran yang nantinya diharapkan dapat membantu aparat pemerintah Desa Sadar untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas kepada masyarakat, yaitu: Untuk sarana dan prasarana Kantor Desa Sadar, sebaiknya pemerintah Desa Sadar dapat sesegera mungkin melengkapi fasilitas-fasilitas sarana yang dibutuhkan di Kantor Desa Sadar serta dapat mengutamakan pembangunan gedung Kantor Desa agar sekiranya dapat digunakan untuk proses pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama proses pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Jeddawi, Murtir. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media.
- Makagansa. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: FusPad.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayne. 2014. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sapi'Idkk. 2013. "Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember". 1, 1: 2-3.
- Santoso, Lay. 2006. *Perjuangan Menuju Puncak*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sjafrijal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Malang: Bumi Aksara.

Wijoyo, Adi, Banjir, Tri. 2013. "Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Zakarudin, Anjar. 2013. "Dampak Pemekaran dalam Ketersediaan Saran dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tipep Kabupaten Muna". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Tampak Depan Kantor Desa Sadar



Fasilitas di dalam Kantor Desa Sadar



Tampak Depan Calon Pondasi Kantor Desa Sadar Baru



Pondasi Kantor Desa Sadar yang baru



Wawancara bersama Ibu Susiyam



Fasilitas MCK Kantor Desa Sadar



KARTU KELUARGA

No. 732202020000

Nama Kepala Keluarga : SUPONO
 Alamat : DUSUN TETELANGKA
 RT/RW : 002 / -
 Desa/Kelurahan : SADAR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Status
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	SUPONO	7322020708810002	LAKILAKI	SALAH
2	SUSIAM	7322026707950006	PEREMPUAN	SADAR
	GUNARIS	7322021303040009	LAKILAKI	SADAR
	MARI A AZHARA	7322026406130001	PEREMPUAN	SADAR

Status Kawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	
			No. Paspor	No. KITAS/KIT
(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KEPALA KELUARGA	WNI		

Contoh Kartu Keluarga masyarakat Desa Sadar

Nomor Akta Registrasi
 Personal Registration Number 7322026405130301 No. AL. 810.5101341



PENCATATAN SIPIL
 REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA INDONESIA
 NATIONALITY INDONESIAN
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
 EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-23092013-0028
 By virtue of Birth Certificate Number
 menurut atlat
 in accordance with atlat
 bahwa di
 that in
 MEI
 MAY tahun
 on year DUA RIBU TIGA BELAS
 TWO THOUSAND THIRTEEN pada tanggal
 on date DUA PULUH EMPAT
 TWENTY FOUR telah lahir
 has been born

NABILA AZHARA

anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH SUPONO DAN IBU SUSIAM
 of no SECOND FEMALE FROM FATHER SUPONO AND MOTHER SUSIAM

Kutipan ini dikeluarkan DI KAB. LUWU UTARA
 The excerpt is issued DUA PULUH TIGA SEPTEMBER
 pada tanggal TWENTY THREE of SEPTEMBER
 on date TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS
 ON YEAR TWO THOUSAND THIRTEEN

Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 Head of PENCATATAN SIPIL



Alim Komar A. Parenrengi, S.P., M. Si.
 NIP : 196905251991031012

Contoh Akta Kelahiran Masyarakat Desa Sadar

Lampiran 1

MATRIKS PENELITIAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA)

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara	Bagaimana dampak kebijakan pemekaran desa ditinjau dari aspek pelayanan publik pada sektor Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara?	Pelayanan	1. Prosedur 2. Jangka Waktu 3. Biaya atau Tarif 4. Sarana dan Prasarana 5. Kompetensi Pelaksana	1. Data Primer, berasal dari informan: a. Sekertaris Desa Sadar b. Kaur Administrasi Desa Sadar c. Masyarakat Desa Sadar 2. Data Sekunder	1. Jenis penelitian adalah Deskriptif dengan desain penelitian yaitu kualitatif. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi

Lampiran 2

MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA)

Fokus	Pertanyaan	Informan
1. Prosedur	a. Bagaimanan prosedur pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Desa Sadar pasca pemekaran?	Abdul Majid Ansar Riati Yustina Sumiati
2. Jangka Waktu Pelayanan	a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga? b. Apakah ada perubahan jangka waktu pelayanan saat sebelum dan setelah pemekaran desa?	Abdul Majid Susiyam SUMiati Rianti
3. Biaya atau Tarif	a. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan masyarakat daam mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga?	Abdul Majid Ansar Susiyam Rianti
4. Sarana dan Prasarana	a. Fasilitas apa yang Nampak di Kantor Desa Sadar saat ini? b. Bagaimana kenyamanan yang dirasakan masyarakat selama proses pelayanan?	Abdul Majid Yustina Sumati Rianti
5. Kompetensi Pelaksana	a. Bagaimanan kecakapan perangkat Desa Sadar dalam memberikan pelayanan kepada msyarakat? b. Apakah perangkat Desa Sadar telah bersikap ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?	Abdul Majid Susiyam Sumiati Rianti

Lampiran 3

**MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA (STUDI KASUS DI DESA
SADAR KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA)**

Fokus	Pertanyaan	Jawaban	Informan	Reduksi Data
--------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------------

<p>1. Prosedur</p>	<p>a. Bagaimana Prosedur pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga?</p>	<p>saya tidak keberatan jika harus melayani masyarakat diluar jam kerja saya. Saya juga menerima masyarakat yang datang kerumah saya untuk mendapatkan pelayanan, sekalipun pada malam hari. Tapi untuk hari sabtu dan minggu saya mohon maaf, saya tidak bisa melayani masyarakat karena pada hari itu saya berada di kebun.</p> <p>Jika masyarakat ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, datang saja ke kantor desa dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Jika masyarakat tidak sempat untuk datang ke kantor kependudukan maka kami yang akan membantu masyarakat untuk ke kantor kependudukan</p>	<p>Abdul Majid</p>	<p>saya tidak keberatan jika harus melayani masyarakat diluar jam kerja saya. Saya juga menerima masyarakat yang datang kerumah saya untuk mendapatkan pelayanan, sekalipun pada malam hari. Tapi untuk hari sabtu dan minggu saya mohon maaf, saya tidak bisa melayani masyarakat karena pada hari itu saya berada di kebun</p> <p>Ansar</p> <p>Jika masyarakat ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, datang saja ke kantor desa dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Jika masyarakat tidak sempat untuk datang ke kantor kependudukan maka kami yang akan membantu masyarakat untuk ke kantor kependudukan</p>
---------------------------	---	---	---------------------------	--

		<p>awalnya Saya datang ke rumah kepala desa, kemudian saya diberi tahu tentang syarat-syarat yang harus saya bawa. Setelah itu ada salah satu aparat yang datang kerumah saya untuk mengambil syarat-syarat yang telah saya lengkapi dan kemudian saya hanya tinggal menunggu akta kelahiran dan kartu keluarga saya jadi.</p> <p>waktu itu saya datang ke kantor desa, saya bilang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya diberi tahu syarat-syaratnya dan saya mengisi blanko yang dikasihke saya, setelah itu aparat Desa Sadar yang menguruskan saya ke Kantor Kependudukan</p>	<p>Rianti</p> <p>Sumiati</p>	<p>saya diberi tahu tentang syarat-syarat yang harus saya bawa. Setelah itu ada salah satu aparat yang datang kerumah saya untuk mengambil syarat-syarat yang telah saya lengkapi dan kemudian saya hanya tinggal menunggu akta kelahiran dan kartu keluarga saya jadi.</p> <p>Saya datang ke kantor desa, saya bilang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya diberi tahu syarat-syaratnya dan saya mengisi blanko yang dikasihke saya, setelah itu aparat Desa Sadar yang menguruskan saya ke Kantor Kependudukan.</p>
--	--	--	--	--

		<p>waktu itu saya datang ke kantor desa, saya dikasih tahu tentang syarat-syarat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya pulang kerumah, saya siapkan syarat-syaratnya dan besoknya ada aparat pemerintah desa yang datang untuk mengambil syarat-syarat yang sudah saya lengkapi.</p>	<p>Yustina</p>	<p>Saya datang ke kantor desa, saya dikasih tahu tentang syarat-syarat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya pulang kerumah, saya siapkan syarat-syaratnya dan besoknya ada aparat pemerintah desa yang datang untuk mengambil syarat-syarat yang sudah saya lengkapi.</p>
<p>2. Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga?</p> <p>b. Apakah ada perubahan jangka waktu saat sebelum dan sesudah pemekaran?</p>	<p>untuk pegurusan akta kelahiran dan kartu keluarga biasa memakan waktu satu minggu lebih, karena pada dasarnya tempat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga itu berbeda jadi harus diselesaikan satu persatu. Kemudian lama atau tidaknya proses pengurusan itu tergantung</p>	<p>Abdul Majid</p>	<p>untuk pegurusan akta kelahiran dan kartu keluarga biasa memakan waktu satu minggu lebih, karena pada dasarnya tempat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga itu berbeda jadi harus diselesaikan satu persatu. Kemudian lama atau tidaknya proses pengurusan itu tergantung</p>

		<p>ada atau tidaknya Ibu Kepala Dinas, karena yang bertanda tangan pada akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Kepala Dinas.</p> <p>waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, kurang lebih 2 minggu baru jadi. Lumayan cepat bila dibandingkan sebelum pemekaran dulu.</p> <p>waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga disini, kurang lebih 1 atau 2 minggu baru selesai semua. Tapi itu lebih cepat dari pada saat sebelum pemekaran dulu yang hampir 1 bulan baru jadi.</p> <p>Sebelum pemekaran dulu saya pernah mengurus akta kelahiran dan kartu</p>	<p>Susiyam</p> <p>Sumiati</p> <p>Rianti</p>	<p>ada atau tidaknya Ibu Kepala Dinas, karena yang bertanda tangan pada akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Kepala Dinas.</p> <p>Waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, kurang lebih 2 minggu baru jadi. Lumayan cepat bila dibandingkan sebelum pemekaran dulu.</p> <p>Saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga disini, kurang lebih 1 atau 2 minggu baru selesai semua. Tapi itu lebih cepat dari pada saat sebelum pemekaran dulu yang hampir 1 bulan baru jadi.</p> <p>Sebelum pemekaran dulu saya pernah mengurus akta kelahiran dan kartu</p>
--	--	---	--	---

<p>3. Biaya atau Tarif</p>	<p>a. Berapa Jumlah biaya yang dikeluarkan masyarakat saat mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga?</p>	<p>keluarga, tapi saya lupa berapa lama baru jadi. Kemarin waktu saya urus di Kepala Desa , lima hari sudah jadi akta kelahiran dan kartu keluarga saya.</p> <p>Di sini, untuk saya pribadi tidak memberikan tarif kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, karena hal tersebut berkaitan dengan pungli. Disamping itu, jika ingin melakukan pungutan harus ada perdanya, dan perda itu masuk dalam APBD desa.</p> <p>kalo untuk masalah biaya, aparat pemerintah Desa Sadar tidak menentukan biaya atau tarif kepada masyarakat yang akan mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga.</p>	<p>Abdul Majid</p> <p>Ansar</p>	<p>keluarga, tapi saya lupa berapa lama baru jadi. Kemarin waktu saya urus di Kepala Desa , lima hari sudah jadi akta kelahiran dan kartu keluarga saya.</p> <p>Di sini, untuk saya pribadi tidak memberikan tarif kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, karena hal tersebut berkaitan dengan pungli. Disamping itu, jika ingin melakukan pungutan harus ada perdanya, dan perda itu masuk dalam APBD desa.</p> <p>kalo untuk masalah biaya, aparat pemerintah Desa Sadar tidak menentukan biaya atau tarif kepada masyarakat yang akan mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga</p>
-----------------------------------	---	--	---	---

<p>4. Sarana dan Prasarana</p>	<p>a. Apa Ketersediaan Sarana yang Nampak di Kantor Desa Sadar dan bagaimana kenyamanan dalam hal</p>	<p>waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu, saya mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 50.000.</p> <p>Karena saya tidak bisa mengurus ke Kabupaten jadi saya minta tolong sama orang-orang di kantor desa untuk kesana, waktu itu saya bayar Rp. 50.000 untuk pengganti bensin.</p> <p>saya membayar Rp. 100.000 saat saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu kepada aparat yang menguruskan saya di Kependudukan, itu untuk transportasi ke Kabupaten</p> <p>sarana dan prasarana desa pasca pemekaran, jika dilihat dalam hal kesehatan desa kami telah memiliki Pustu (pusat</p>	<p>Yustina</p> <p>Susiyam</p> <p>Rianti</p> <p>Abdul Majid</p>	<p>waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu, saya mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 50.000.</p> <p>Karena saya tidak bisa mengurus ke Kabupaten jadi saya minta tolong sama orang-orang di kantor desa untuk kesana, waktu itu saya bayar Rp. 50.000 untuk pengganti bensin</p> <p>saya membayar Rp. 100.000 saat saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu kepada aparat yang menguruskan saya di Kependudukan, itu untuk transportasi ke Kabupaten</p> <p>sarana dan prasarana desa pasca pemekaran, jika dilihat dalam hal kesehatan desa kami telah memiliki Pustu (pusat kesehatan</p>
---------------------------------------	--	---	--	--

	<p>pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat selama mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga?</p>	<p>kesehatan terpadu) yang dulunya saat belum dimekarkan kami belum memiliki itu. Untuk sarana dan prasarana dikantor desa, kami telah memiliki perangkat komputer untuk melayani keperluan masyarakat, namun untuk fasilitas yang ada didalam kantor desa sendiri belum terlalu banyak terlihat hanya ada kursi dan meja, karena kantor desa kami masih dalam proses pembenahan pasca pemekaran. Namun hal tersebut tidak mengganggu proses pelayanan aparat pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat.</p> <p>saya pernah ke Kantor Desa Sadar, kalau kantor desa sadar itu fasilitas yang saya lihat hanya ada</p>	<p>Yustina</p>	<p>terpadu) yang dulunya saat belum dimekarkan kami belum memiliki itu. Untuk sarana dan prasarana dikantor desa, kami telah memiliki perangkat komputer untuk melayani keperluan masyarakat, namun untuk fasilitas yang ada didalam kantor desa sendiri belum terlalu banyak terlihat hanya ada kursi dan meja, karena kantor desa kami masih dalam proses pembenahan pasca pemekaran. Namun hal tersebut tidak mengganggu proses pelayanan aparat pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat.</p> <p>saya pernah ke Kantor Desa Sadar, kalau kantor desa sadar itu fasilitas yang saya lihat hanya ada kursi,</p>
--	---	--	-----------------------	---

<p>5. Kompetensi Pelaksana</p>	<p>Bagaimana Kecakapan aparat pemerintah Desa Sadar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?</p>	<p>kursi, meja dan gambar-gambar. Mungkin karena sedang diperbaiki jadi masih terbatas fasilitasnya.</p> <p>kalau saya lihat, sementara inikan kantor desa disini sedang dalam proses pembangunan, jadi yang ada hanya meja dan kursi dan itu bisa dimaklumi.</p> <p>saya pernah ke kantor Desa Sadar saat saya mengambil sembako, dan saya melihat ada kursi dan meja kayu. Lumayan nyamanlah tempatnya, karena masih diperbaiki</p> <p>Terus terang saja, disini sumber daya manusiannya masih kurang. Saya juga kurang tahu bagaimana programprogram dari atas,</p>	<p>Sumiati</p> <p>Rianti</p> <p>Abdul Majid</p>	<p>meja dan gambar-gambar. Mungkin karena sedang diperbaiki jadi masih terbatas fasilitasnya.</p> <p>kalau saya lihat, sementara inikan kantor desa disini sedang dalam proses pembangunan, jadi yang ada hanya meja dan kursi dan itu bisa dimaklumi.</p> <p>saya pernah ke kantor Desa Sadar saat saya mengambil sembako, dan saya melihat ada kursi dan meja kayu. Lumayan nyamanlah tempatnya, karena masih diperbaiki juga.</p> <p>Disini sumber daya manusiannya masih kurang. Saya juga kurang tahu bagaimana programprogram dari atas,</p>
---------------------------------------	--	--	--	--

		<p>seharusnya itu aparat desa baru di tata, karena pada dasarnya mereka belum pernah mengadakan pelatihan sebelumnya. Seharunya mereka dilatih agar mereka juga mempunyai ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi, apapun yang saya tahu selama ini saya beri tahu kepada mereka agar mereka bisa sambil belajar. Dan setau saya yang dilatih diatas selama ini adalah ketua BPD, Kepala Desa dan Sekertaris Desa. Namun untuk masalah keramahan, aparat pemerintah Desa Sadar sangat ramah kepada masyarakat.</p> <p>sikap aparat selama ini kepada saya sangat baik, ramah dan mereka selalu cepat dalam melayani saya.</p>	<p>Susiyam</p>	<p>seharusnya itu aparat desa baru di tata, karena pada dasarnya mereka belum pernah mengadakan pelatihan sebelumnya. Seharunya mereka dilatih agar mereka juga mempunyai ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi, apapun yang saya tahu selama ini saya beri tahu kepada mereka agar mereka bisa sambil belajar. Dan setau saya yang dilatih diatas selama ini adalah ketua BPD, Kepala Desa dan Sekertaris Desa. Namun untuk masalah keramahan, aparat pemerintah Desa Sadar sangat ramah kepada masyarakat.</p> <p>sikap aparat selama ini kepada saya sangat baik, ramah dan mereka selalu cepat dalam melayani saya.</p>
--	--	---	-----------------------	---

		<p>Sikapnya aparat baik, pada saat saya datang kesana saya langsung ditanya-tanya keperluan saya, tidak ada yang sombong dan cepat semua dalam berkerja.</p> <p>pak sekdes selama ini sangat baik pada saya, ramah sekali</p>	<p>Sumiati</p> <p>Rianti</p>	<p>Sikapnya aparat baik, pada saat saya datang kesana saya langsung ditanya-tanya keperluan saya, tidak ada yang sombong dan cepat semua dalam berkerja.</p> <p>pak sekdes selama ini sangat baik pada saya, ramah sekali.</p>
--	--	---	--	--

Lampiran 4

DAFTAR NAMA INFORMAN

1. NAMA : ABDUL MAJID
PEKERJAAN : SEKRETARIS DESA SADAR
2. NAMA : ANSAR
PEKERJAAN : KAUR ADMINISTRATIF DESA SADAR
3. NAMA : SUMIYATI
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA
4. NAMA : SUSIYAM
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA
5. NAMA : YUSTINA
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA
6. NAMA : RIAN TI
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
MAKASSAR 90222

Makassar, 20 Januari 2016

Kepada

Nomor : 00724/P2T-BKPM/19.36P/VII/01/2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Bupati Luwu Utara

di-

Masamba

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar Nomor : 0208/UN36.6/PL/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Fajar Kartini
Nomor Pokok : 1265142006
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. A.P Pettarani, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"DAMPAK KEBIJAKAN PEMAKARAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA)"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 26 Januari s/d 26 April 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., M.S

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19610513 199002 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Dekan Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar di Makassar,
2. Peringgal

website : www.p2tprovusulsel.com, email : p2t_provusulsel@yahoo.com





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN BONE-BONE
DESA SADAR**

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITIH

Nomor : 410/037/Sadar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ABDUL MAJID

Jabatan : Sekdes Sadar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : FAJAR KARTINI

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Sukaraya, 21 April 1995

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswi Univesitas Negeri Makassar

Alamat : Jalan Bonto Duri VI. Makassar.

Yang tersebut diatas adalah benar-benar telah selesai mengadakan Penelitian dengan Judul " Dampak Kebijakan Pemekaran Desa "(Studi Kasus di Desa Sadar Kecamatan Bone – Bone Kabupaten Luwu Utara).
Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Sadar, 1 Pebruari 2016



ABDUL MAJID



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alamat. Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105
Website : <http://ian.unm.ac.id>

PERSETUJUAN JUDUL DAN CALON PEMBIMBING

A. IDENTITAS

1. Nama : Fajar Kartini
2. Tempat/Tgl Lahir : Sukaraya, 21 April 1995
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265142006
4. Jurusan : Ilmu administrasi negara
5. Program Studi : Ilmu administrasi negara

B. JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI

DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP SARANA DAN PRASARANA
MASYARAKAT DESA PECAHAN DI DESA CADAR KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA

C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

No.	Nama Pembimbing/NIP	Tanda Tangan
1	Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si NIP. 195109251976021001	1.
2	Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si NIP. 196012311988031011	2.

Makassar, 19 mei 2015

Ketua Program Studi
Ilmu Adm. Negara FIS UNM

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alamat: Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105
Website : <http://ian.unm.ac.id>

PERSETUJUAN JUDUL DAN CALON PEMBIMBING

A. IDENTITAS

1. Nama : Fajar Kartini
2. Tempat/Tgl Lahir : Sukaraya, 21 April 1995
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265142006
4. Jurusan : Ilmu administrasi negara
5. Program Studi : Ilmu administrasi negara

B. JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI

DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP SARANA DAN PRASARANA
MASYARAKAT DESA PECAHAN DI DESA CADAR KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA

C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

No.	Nama Pembimbing/NIP	Tanda Tangan
1	Dr. Maharuddin Pangeu, M.Si NIP. 195109251976021001	1.
2	Dr. H. Muhammad Guntur, M. Si. NIP. 196012311988031011	2.

Makassar, 19 mei 2015

Ketua Program Studi
Ilmu Adm. Negara FIS UNM

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fajar Kartini
NIM : 1265142006
Tempat/ Tgl. Lahir : Sukaraya, 21 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Pembimbing masing-masing:

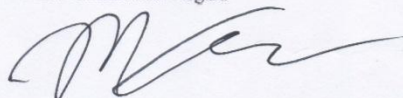
1. Dr. Maharuddin Pangewa, M. Si
2. Dr. H. Muhammad Guntur M. Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur jiplakan/ plagiat.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benaran, maka saya siap dituntut didalam/ luar pengadilan dan menanggung resiko yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Muhammad Guntur, M. Si
NIP. 19601231 198803 1 011

Makassar, 9 September 2016
Yang membuat pernyataan:



Fajar Kartini
NIM. 1265142006



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 0207/UN36.6/DL/2016

18 Januari 2016

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul Skripsi
dan Pembimbing

Yth. : Sdr. **Fajar Kartini**
di Makassar

Stambuk : 1265142006

Berdasarkan surat permohonan Saudara tertanggal 18 Januari 2016 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat ini, maka dengan ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa rencana skripsi berjudul:

Dampak Kebijakan Pemakaran Desa (Studi Kasus di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara).

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si.
2. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.

Dapat disetujui dan dinyatakan SAH.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.

an. Dekan

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. Firman Umar, M.Hum.

NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 0208/UN36.6/PI/2016

18 Januari 2016

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan
Penelitian

Yth. : **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini,
dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: **Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone
Kabupaten Luwu Utara** dalam rangka penulisan skripsi.

Nama : **Fajar Kartini**
Stambuk : 1265142006
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dosen Pembimbing :
1. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si.
2. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.

Masalah yang diteliti :

**Dampak Kebijakan Pemakaran Desa (Studi Kasus di Desa Sadar Kecamatan Bone-
Bone Kabupaten Luwu Utara).**

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.


an. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,
Dr. Herman Umar, M.Hum.
NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara

RIWAYAT HIDUP



Fajar Kartini, lahir di Sukaraya pada tanggal 21 April 1995.

Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sutikno dan

Puji. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2000 di

SDN 195 Sukaraya dan berhasil menyelesaikan pendidikan

pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Bone-Bone dan

tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke

SMAN 1 Bone-Bone dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan

pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Makassar dan

terdaftar sebagai mahasiswi di Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Makassar.